

**DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN
DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MARIA HARTATI MP SIMANJORANG
NIT. 20293509

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Warkah is an important document and very fundamental to administrative accountability in land sector. Warkah are a means of proving physical data and juridical data on a plot of land and that have been used as a basis for land registration so that their existence must still be intact as long as the plot of land still exist. The flood disaster that hit Bekasi City Land Office resulted warkah belonging to the office being defective and lost. Defective and disappearance of warkah put the office in serious problem because of or not fulfilling legal and administrative aspects as evidence. Therefore, it is necessary to restore warkah that was defective and lost due to the flood disaster.

This research was conducted to find out (1) the causes of defective or lost of warkah in Bekasi City Land Office, (2) efforts to restore defective warkah, and (3) legal certainty in land registration caused by the non-recoverability of defective or lost warkah. This research using qualitative method with descriptive approach. Data was obtained through direct interviews with informants and document studies from several related libraries and related regulations.

The research results show that the defective and lost of warkah in Bekasi City Land Office was not only caused by the flood disaster but the Bekasi City Land Office's record storage which did not fulfil the ideals or criterias for standardization of facilities and infrastructure was another causes In response to this, the Bekasi City Land Office together with representatives of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency, the West Java Regional Office of the National Land Agency, and the National Archives of the Republic of Indonesia do restoration as an effort to restore of defective and lost warkah due to the flood disaster. However, not all defective warkah by the flood disaster can be restored. Most of the that had to be destroyed because their physical condition was quite serious. The end of the destruction process is followed by a Destruction Report (Berita Acara Pemusnahan) which records and serves as evidence that the destruction was carried out according to applicable procedures so that can be presented as evidence. So, Destruction Report are used to maintain existence of warkah post-disaster to guarantee legal certainty over land rights.

Keywords: *Warkah, Recovery, Legal Certainty, Disaster*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Kajian Literatur	4
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Bencana.....	9
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	11
3. Warkah Pertanahan	12
4. Dampak Rusaknya Warkah Pertanahan	18
5. Penanganan Kasus Pertanahan.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	26
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Kota Bekasi	32
1. Letak Wilayah	32
2. Kondisi Topografi dan Iklim.....	34
3. Kondisi Demografi.....	35
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Bekasi	36
C. Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Pengelolaan Unit Kearsipan III	39
BAB V DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI.....	41
A. Faktor Penyebab Rusaknya Warkah Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.....	41
1. Bencana Banjir	41
2. Ruang Penyimpanan Arsip	44
B. Upaya Pemulihan Warkah Pertanahan Pascabencana	49
1. Restorasi.....	54
2. Pemusnahan	63
C. Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Pascabencana.....	69
1. Eksistensi Warkah Pertanahan dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah.....	69
2. Eksistensi Warkah Pertanahan Pascabencana dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Pascabencana.....	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya (Septiani P, 2019). Salah satu akar permasalahan di bidang pertanahan disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi pertanahan sehingga arsip pertanahan (termasuk warkah pertanahan) rentan rusak atau hilang (Suhattanto et al., 2021; Sumardjono, 2008). Padahal, arsip pertanahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penerbitan hak atas tanah bahkan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan (Chairani & Suliyati, 2017; Fatriyanto Mooduto et al., 2021). Kerusakan dan kehilangan arsip pertanahan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor kesalahan manusia ataupun faktor bencana (Saputra, 2018; Suliyati, 2017; Wigati & Rachman, 2019).

Bencana di bidang pertanahan menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam atau non alam yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana, rusak atau musnah arsip pertanahan pendukung pelayanan pertanahan serta sertipikat hak atas tanah. Bencana alam yang dimaksud seperti tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya (Rohmaningtyas, 2021). Salah satu bencana di bidang pertanahan yang terjadi pada awal tahun 2020 adalah bencana banjir di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Bencana banjir yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian. Banjir tersebut mengakibatkan pagar samping basement Kantor Pertanahan Kota Bekasi rusak parah (roboh) karena debit air terlalu besar. Hal tersebut menyebabkan basement Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang digunakan sebagai tempat menyimpan arsip pertanahan terendam banjir sehingga mengakibatkan rusaknya arsip pertanahan. Arsip pertanahan yang rusak

akibat terendam banjir tersebut berupa warkah pertanahan. Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa warkah adalah dokumen yang menjadi alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah.

Bencana banjir tersebut menempatkan Kantor Pertanahan Kota Bekasi ke dalam permasalahan yang serius. Bagaimana tidak, warkah pertanahan merupakan arsip hidup (Fatriyanto Mooduto et al., 2021) yang menjadi “nyawa” Kantor Pertanahan Kota Bekasi justru rusak bahkan cukup parah. Padahal, warkah pertanahan sangat vital karena mengandung unsur hukum dan administratif (Chairani & Suliyati, 2017) sehingga keberadaannya harus tetap utuh sepanjang bidang tanahnya masih ada. Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah kemudian menegaskan bahwa surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat selama data fisik dan data yuridisnya sesuai. Dapat dikatakan bahwa surat tanda bukti hak dapat memberikan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat apabila data fisik dan data yuridis yang dimuat di dalam sertipikat sesuai dengan arsip surat ukur, buku tanah, dan didukung oleh warkah yang tersimpan di kantor pertanahan.

Rusaknya warkah pertanahan berpotensi tidak terpenuhinya aspek hukum dan aspek administrasi sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan baik bagi Kantor Pertanahan Kota Bekasi maupun bagi pemegang hak atas tanah. Bisa dibayangkan jika suatu saat terdapat gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah dan tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk melemahkan dalil gugatan dari penggugat, maka tidak menutup kemungkinan pemegang hak atas tanah tersebut akan kehilangan haknya.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengulas tentang **Dampak Bencana Banjir Terhadap Warkah Pertanahan dan Upaya Pemulihannya di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab rusaknya warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam pemulihan warkah pertanahan yang rusak?
3. Bagaimana kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang ditimbulkan oleh tidak dapat dipulihkannya warkah pertanahan yang rusak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab rusaknya warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam pemulihan warkah pertanahan rusak.
3. Mengetahui kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang ditimbulkan oleh tidak dapat dipulihkannya warkah pertanahan yang rusak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta wawasan di bidang pertanahan khususnya mengenai pemulihan data warkah pertanahan yang rusak serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh tidak dapat dipulihkannya warkah pertanahan yang rusak.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan pasca terjadinya bencana alam.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab rusaknya warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2020. Volume debit air yang begitu besar mengakibatkan pagar samping *basement* Kantor Pertanahan Kota Bekasi roboh sehingga tinggi genangan air tersebut mampu menjangkau ruang penyimpanan arsip. Akibatnya, warkah pertanahan yang ada di ruangan tersebut terendam banjir cukup lama hingga rusak. Selain itu, ruang penyimpanan arsip milik kantor tersebut menjadi penyebab lainnya. Ruang penyimpanan arsip belum memenuhi kriteria standarisasi sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip sesuai yang ditegaskan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga ruang penyimpanan tersebut rawan akan terkena bencana serta tingkat kerawanan yang tinggi terhadap keamanan dan keselamatan warkah pertanahan.
2. Pemulihan warkah pertanahan pascabencana banjir di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dilaksanakan oleh Tim Pemulihan Pascabencana yang terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pemulihan warkah pertanahan pascabencana dilakukan dengan cara restorasi. Restorasi dilakukan terhadap warkah pertanahan pascabencana yang kondisinya masih dapat dilakukan pemulihan, yaitu sebanyak 10.801 berkas. Warkah pertanahan pascabencana yang tidak dapat dipulihkan, dilakukan pemusnahan, yaitu sebanyak 55.018 berkas.

3. Warkah pertanahan yang terdampak bencana banjir dengan kondisi tidak dapat dipulihkan, dilakukan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan harus diikuti dengan Berita Acara Pemusnahan sebagai hasil akhir proses tersebut. Keberadaan Berita Acara Pemusnahan tersebut menjadi pengganti warkah pertanahan yang dimusnahkan ketika diminta dihadirkan dalam pengadilan untuk menjadi alat bukti atas sebidang tanah dalam kasus pertanahan. Artinya, walaupun warkah pertanahan pascabencana tersebut dilakukan pemusnahan, tetapi dengan adanya Berita Acara Pemusnahan, jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah tetap tercapai. Namun, warkah pertanahan pascabencana yang tidak teridentifikasi, tidak mampu memberikan kepastian hukum Hak Atas Tanah.

B. Saran

1. Ruang penyimpanan arsip di Kantor Pertanahan Kota Bekasi hendaknya sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip agar arsip pertanahan, termasuk warkah pertanahan, yang ada di dalamnya terpelihara selama arsip pertanahan tersebut memiliki nilai guna.
2. Perlu adanya kebijakan baru yang mengatur mengenai pedoman perlindungan dan penyelamatan arsip pertanahan (khususnya warkah pertanahan) dari bencana sehingga apabila terjadi bencana, bisa mengetahui prosedur untuk menyelamatkan arsip pertanahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nurasa, Akur., Dian Aries Mujiburohman. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif. Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish., 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan, Nugraha. *Teknik Sampling*, Bogor: Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, 2005.
- Sibuea, H.P dan Sukartono H. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009.
- Sumardjono, Maria. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Adawiah, R 2017, 'Pengelolaan Arsip pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Polewali Mandar', Skripsi pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Amrin, R, *et al.*, 2022, 'Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam', *Jurnal Tunas Agraria*, vol.5, no.1, hlm 65-76.
- Anindyati, F, *et al.*, 2020, 'Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi', *Jurnal Tunas Agraria*, vol.3, no.3, hlm 40-60.
- Apriani, D dan Bur, A 2021, 'Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol.5, no.2, hlm. 220-239.
- Barru H., Kalalo, F., Muaja, H 2021, 'Kedudukan Warkah Tanah Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah', *Lex Privatum*, vol. IX, no. 3, hlm 25-34.

- Benuf, K dan Azhar, M 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7, no.1, hlm 20-33.
- Chairani, R dan Suliyati, T 2017, 'Pemanfaatan arsip Tanah dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang', *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol.6, no.3, hlm 691-700.
- Edi, D dan Betshani, S 2009, 'Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse', *Jurnal Informatika*, vol.5, no.1, hlm 71-85.
- Fathurrahman, M 2018, 'Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi', *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, vol.3, no.2, hlm 215-225.
- Fatriyanto, M., Wulansari, H., dan Riyadi, R 2021, 'Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya dengan Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan Online di Kabupaten Bantul', *Jurnal Tunas Agraria*, vol.4, no.2, hlm 250-274
- Fibriani, R 2020, 'Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan *Force Majeure* Pandemi Covid-19 di Indonesia', *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, vol.10, no.2, hlm 202-215.
- Gunena, C., Pinasang, D., dan Palilingan, T 2021, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam', *Lex Privatum*, vol.9, no.13, hlm 33-40.
- Gustaman, F 2014, 'Pemulihan Data Pendaftaran Tanah Pascabencana Kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hafizhan, A 2020, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Kota Bekasi', Sripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juanda, E 2016, 'Kekuatann Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol.4, no.1, hlm 27-46.
- Khasanah D dan Alfons 2021, 'Analisis Yuridis Akibat Dari Musnahnya Obyek Jaminan yang Dilekati Hak Tanggungan Karena Bencana Alam', *Jurnal Widya Bhumi*, vol.1, no.2, hlm 149-159.
- Kuswati, S dan Zulaikha, S 2020, 'Preservasi Arsip Pascabencana Banjir (Studi Komparasi di LIPI Jakarta, Depo Arsip Koran Suara Merdeka Semarang dan Perpustakaan Ceria Demak)', *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, vol.7, no.2, hlm 1-15.
- Mahmud M 2013, 'Pentingnya Manajemen Sistem Penyimpanan Arsip', Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.

- Mardiyanto V 2017, 'Strategi Kegiatan Preservasi Arsip Terdampak Bencana: Lokasi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia', *KHAZANAH: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, vol.10, no.2, hlm 92-106.
- Miastuti, N 2021, 'Strategi Percepatan Digitalisasi Warkah Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nurtanzila, L 2018, 'Penerapan Disaster Recovery and Contingency Planning pada Perlindungan Arsip Vital di BPN DIY', *Jurnal Diplomatika*, vol.1, no.2, hlm 82-92.
- Pakingki, J 2023, 'Potensi Dampak Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Prasetyo, B., Ikhwanul, M., dan Rio, P. 2019, 'Sertipikat Hak Milik Tanpa Warkah di Indonesia', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol.3, hlm 1-15.
- Purnama, H 2020, 'Evaluasi Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif pada Record Center Sekretariat Daerah (SETDA) DIY', Tugas Akhir pada Program Studi Kearsipan Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada.
- Purnamasari, A 2019, 'Prosedur Temu Kembali Arsip Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Depok', Skripsi pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putri, A, *dkk* 2023, 'Efektivitas Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, vol.14, no.2, hlm 115-124.
- Rahman, A 2022, 'Analisis Pembatalan Sertipikat Akibat Cacat Administrasi (Studi Kasus Permasalahan 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas Salve Veritate dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04931/Cakung Barat atas nama Harto Khusumo di Kota Administrasi Jakarta Timur', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ramadhani, R 2021, 'Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah', *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, vol.2, no.1, hlm. 30-40.
- Riyadi, A 2018, 'Ketika Bencana Terjadi: Studi Kasus Penyelamatan dan Pemulihan Dokumen Masyarakat', *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, vol.39, no.1, hlm 51-64.

- Rohima, W, et al., 2023, 'Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, Penanganan Kasus Pertanahan di Kota Probolinggo', *Public Service and Governance Journal*, vol.4, no.2, hlm 61-75.
- Rohmaningtyas, N 2021, 'Wakaf Dan Bencana Alam di Indonesia', *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, vol 4, no.2, hlm 82-91.
- Saputra, R 2018, 'Analisis Pengelolaan Arsip di Sekretariat DPRD Kabupaten', *Jurnal Ecogen*, vol.1, no.4, hlm 134-139.
- Saputro, B 2017, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat yang Arsipnya Musnah Terbakar Pasca Kebakaran Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung.
- Septiani, P 2019, 'Penataan Kembali Struktur Penguasaan Hak Atas Tanah Pascabencana Alam Gempa Bumi di Kota Palu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung.
- Sholikah, M dan Oktarina, N 2018, 'Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan Untuk Menunjang Akuntabilitas Sekolah', *Economic Education Analysis Journal*, vol.7, no.3, hlm. 1178-1192.
- Suhattanto, M., Sarjita., Sukayadi., dan Mujiburohman, D 2021, 'Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertipikat Tanah Elektronik' *Jurnal Widya Bhumi*, vol.1, no.2 hlm 87-100.
- Sujiyanti, R 2020, 'Pengelolaan Arsip In Aktif Pada Unit Kearsipan PT Pelindo Daya Sejahtera Surabaya', Thesis pada Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
- Suliyati, T 2017, 'Menyelamatkan Arsip dari Bencana: Antara Idealisme dan Realitas', *Jurnal Lentera Pustaka*, vol.3, no.2, hlm 141-152.
- Suratman, B dan Ardiana, S 2021, 'Pengelolaan Arsip Dalam Mendukung Pelayanan Informasi pada Bagian Tata Usaha di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, vol.9, no.2, hlm 335-348.
- Thabitha, G 2023, 'Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Tumembouw, D 2019, 'Tinjauan Yuridis Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, vol. VII, no.6, hlm 50-57.

Wardhani, S dan Sesung, R 2018, 'Kekuatan Hukum Sertipikak Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah', *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol.21, no.1, hlm 61-84.

Wigati, F dan Rachman, M 2019, 'Identifikasi Perlindungan Arsip Statis Terhadap Bencana Kebakaran: Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia', *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, vol. 40, no.1, hlm 137-146.

Yuniansari, R dan Mulada, D 2021, 'Eksistensi Warkah Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah', *Nationally Accredited Journal*, vol.4, no.2, hlm 146-157.

Publikasi Pemerintah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2024, *Data dan Informasi Bencana di Indonesia*, dilihat pada 7 Juni 2024, <https://dibi.bnpb.go.id/>

Badan Pusat Statistik 2024, *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024*, dilihat pada 10 Mei 2024,
<https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MzVmZmUyZDM1MTA0YjM5ZmViNTc3ZThm&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhci5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyNC8wMi8yOC8zNWZmZTJkMzUxMDRiMzlmZWl1NzdlOGYvcHJvdmluc2ktamF3YS1iYXJhdC1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDI0Lmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNi0xMCAxND00Mjo0NQ%3D%3D>

Badan Pusat Statistik 2024, *Kota Bekasi dalam Angka 2024*, dilihat pada 10 Mei 2024,
<https://bekasikota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNjYjUxOWI2MDRiOWJINGQzZjMzOTcy&xzmn=aHR0cHM6Ly9iZWthc2lrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDI0LzAyLzI4LzhjY2I1MTliNjA0YjliZTRkM2YzMzk3Mi9rb3RhLWJla2FzaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDI0Lmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNi0xMCAxND00DozNg%3D%3D>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, dilihat pada 10 Februari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Peta Tematik Indonesia 2014, *Administrasi Kota Bekasi*, dilihat pada 12 Mei 2024, <https://petatematikindo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/administrasi-kota-bekasi-a12.jpg?w=723>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian ATR/BPN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif

Website

Hidayat R 2020, 'Awal Tahun Baru 2020, Kota Bekasi Dikepung Banjir', *iNews blog*, web diposting pada 01 Januari 2020, dilihat pada 20 Mei 2024, <https://jabar.inews.id/berita/awal-tahun-baru-2020-kota-bekasi-dikepung-banjir>.

Souisa, A 2021, 'Pengertian Warkah Tanah, Fungsi, dan Contohnya', web diposting pada 30 Mei 2021, dilihat pada 11 Februari 2024, <https://www.finansialku.com/pengertian-warkah-tanah-fungsi-dan-contohnya/>

Wikipedia 2024, 'Kota Bekasi', web diposting pada 6 Juni 2024, dilihat pada 8 Juni 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi